

SKRIPSI

**MONEY POLITICS DAN PARTISIPASI KAUM PEREMPUAN PADA
PILKADA 2020 DI KOTA MAKASSAR**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD IRFAN K

E041191058

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**MONEY POLITICS DAN PASTISIPASI KAUM PEREMPUAN PADA
PILKADA 2020 DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan Oleh :

Muhammad Irfan K

E041191058

Menyetujui,

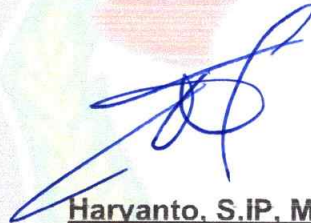
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhammad, M. Si.

NIP.197109171997031001



Haryanto, S.IP, M.A.

NIP. 198610082019031009

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.

NIP. 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**MONEY POLITICS DAN PASTISIPASI KAUM PEREMPUAN PADA
PILKADA 2020 DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan Oleh :

Muhammad Irfan K

E041191058

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi
Pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Muhammad, M. Si.

(.....)

Sekretaris : Haryanto, S.IP, M.A.

(.....)

Anggota : Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.

(.....)

Anggota : Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Irfan K

NIM : E041191058

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Sttudi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Money Politics dan Partisipasi Kaum Perempuan pada Pilkada 2020 di Kota Makassar”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau di kutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Juni 2023



(MUHAMMAD IRFAN K)

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkah dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Money Politics dan Partisipasi Kaum Perempuan pada Pilkada 2020 di Kota Makassar”**. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa strata satu (S-1) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP.).

Skripsi ini penulis persembahkan pertama-tama kepada dua orang yang sangat berjasa di dalam hidup penulis yaitu kedua orang tua penulis, Bapak Drs Abd Kadir Kasim dan Ibu Rasyida, yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu sabar dalam mendidik dan memberikan motivasi, nasehat, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.

Terima kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing Bapak Prof. Dr. Muhammad M.Si., dan Bapak Haryanto, S.IP., M.A. yang telah membimbing penulis menulis skripsi ini dari awal proposal hingga ujian akhir.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menyatakan beribu terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., yang telah memberi penulis kesempatan belajar di Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran rektorat. Terima kasih tak terlupakan juga pada Rektor Universitas Hasanuddin 2018-2022, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si., sekaligus Dosen Ilmu Politik yang telah memberi penulis kesempatan menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si., beserta segenap jajaran staf akademik, ada Pak Sutamin, Ibu Irma, dan Pak Herman.
4. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Alumni, Bapak Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si., beserta segenap jajaran staf.
5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si. beserta segenap jajaran staf.
6. Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D., yang telah membantu kelancaran administrasi akademik.
7. Dosen-dosen Departemen Ilmu Politik : Bapak Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., Alm. Bapak Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag., Bapak Dr. Muhammad

Saad, M.A., Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Ariana, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si., Bapak Andi Naharuddin, S.IP., M.Si., Ibu Endang Sari, S.IP., M.Si., Bapak Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si., Ibu Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP., Bapak Zulhajar, S.IP., M.A., dan Ibu vii Dian Ekawaty, S.IP., M.A., yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.

8. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak Syamsuddin, S.T., dan Ibu Musriati S.E., yang telah membantu kelancaran penulis dalam berbagai urusan administrasi perkuliahan.
9. Seluruh teman-teman **Ilmu Politik angkatan 2019**. Teman-teman dari awal perkuliahan hingga saat ini yang insyaallah akan tetap menjadi teman yang baik. Terima kasih atas cerita yang diukir selama ini semoga kita semua bisa mencapai kesuksesan masing masing.
10. Seluruh teman-teman **DIPLOMASI 19**. Terima kasih sudah menjadi saudara dan keluarga baru serta menjadi sahabat selama penulis berkuliah di Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Terima kasih sudah mengisi hari-hari perkuliahan dari masa pengaderan mahasiswa baru sampai saat ini. Terima kasih atas cerita, ilmu, pengalaman, tawa, dan tangis yang telah terukir selama ini. Kebersamaan yang tidak bakalan penulis lupakan, semoga kita semua mencapai keberhasilan kita masing-masing
11. **Antiktokers**, teman baik penulis yang selalu ada saat suka maupun duka, teman dari awal perkuliahan sampai saat ini (**fadel, risda, rista, shila, riri, dan mifta**). Terima kasih selalu ada buat penulis sampai detik ini, selalu

mendukung dan mendorong penulis untuk tetap semangat menjalankan perkuliahan ini sampai sarjana. Terima kasih orang baik yang selalu melahirkan tawa disetiap pertemuan, semoga pertemanan ini bertahan sampai kelak tua nanti, semoga nantinya kita menjadi orang yang sukses dan menjadi orang hebat.

12. Teruntuk teman-teman **NakSoeltan (Miraldi, Juna, Dian, Asrul, Appy & Nanda)** terima kasih sudah menjadi penyemangat buat penulis sejak SMA hingga saat ini, semangat buat kalian semua dalam mengejar cita-cita dan semoga kedepannya kita semua bisa bertemu kembali dan membawa cerita hebat masing-masing, semangat buat kalian.
13. Teruntuk **Gibah (Yoga, Fanny, Egi)**, terima kasih telah menjadi teman baik bagi penulis dari SMA hingga saat ini, terima kasih sudah menjadi motivasi buat penulis, semoga kedepannya kita dipertemukan kembali dan membawa cerita hebat masing masing. Sukseski
14. Teruntuk **Qbar Sport & Sahabat Jamur**, terima kasih telah menjadi ruang have fun bagi penulis, dan menyenangkan untuk penulis selama ini, terima kasih sudah menghibur ketika penulis lelah menyusun penelitian dan menjadi semangat untuk penulis. Semoga kelak nanti bisa mabar kembali dan push sampai mytic.
15. Teruntuk anggota **IFA** terima kasih selalu ada saat penulis butuh bantuan, dan terima kasih sudah menjadi teman story selama kuliah, semangat buat kalian semua dalam mengejar gelar dan cita cita, semoga kedepannya kita dipertemukan kembali dan membawa cerita hebat masing masing.

16. Teruntuk teman-teman **KKNT Gel-108 Kab. Takalar, Kec. Polsel, Kel. Bulukunyi (Vidal, Nita, Risma, Novi & Enzy)** terima kasih sudah menjadi teman baik selama masa KKN buat penulis, Terima kasih sudah mengisi hari-hari KKN pada saat itu, Terima kasih atas cerita, ilmu, pengalaman, tawa, dan tangis yang telah terukir selama ini. Kebersamaan yang tidak bakalan penulis lupakan, semoga kalian semua bisa sukses dan bisa mendapatkan gelar masing-masing.
17. Teruntuk saudaraku **Ichsan**, semangat kuliah dan mengejar gelarnya, terima kasih sudah menemani penulis dalam keadaan sulit dalam pengurusan proposal kemarin, semangat kejar gelarnya saudara.
18. Teruntuk **Keluarga Besar**, saya ucapkan banyak terimakasih atas seluruh partisipasi kontribusi material maupun non material sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dalam keadaan lancar, terimakasih kepada seluruh saudara saudara saya yang telah memotivasi dan mensupport segala upaya yang saya lakukan selama menjalani perkuliahan ini, semoga kita semua diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah SWT, Aamin.
19. Teruntuk perempuan spesial yang dulu selalu ada buat penulis, terima kasih atas seluruh perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh penulis, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk penulis, terima kasih sudah mendukung, menyemangati, dan membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, semoga kebaikanmu selama ini mendapat balasan yang setimpal dikemudian hari dan semoga mendapatkan jodoh dengan apa yang

diharapkan. Sampai jumpa dan semangat menjalani kehidupan masing masing.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini.

Makassar, 15 Juni 2023



MUHAMMAD IRFAN K

ABSTRAK

Muhammad Irfan K E041191058. Money Politics dan Partisipasi Kaum Perempuan Pada Pilkada 2020 di Kota Makassar. Di bawah bimbingan Prof Muhammad sebagai Pembimbing Utama dan Haryanto sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi respond dan tindakan kaum perempuan dengan terdapatnya money politik dan mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi penentu kaum perempuan sehingga menerima money politics pada pilkada tahun 2020 di kota makassar.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun pengambilan data dilakukan melalui wawancara, penentuan informan, observasi dan dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian dibahas dalam tinjauan teoritis tentang partisipasi politik perempuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh Money Politics terhadap partisipasi kaum perempuan pada pilkada 2020 di kota makassar memang memberikan pengaruh yang cukup signifikan dimana mayoritas kaum perempuan masyarakat kota makassar yang menerima Money Politics turut berpartisipasi dalam pilkada walaupun dalam pemberian barang ataupun uang. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan dalam melakukan Money politics pada pilkada 2020 yaitu karena masalah perekonomian, pendidikan politik yang rendah dan budaya.

Kata Kunci : Perempuan, Money Politics, Partisipasi

ABSTRACT

Muhammad Irfan K E041191058. Money Politics and Women's Participation in the 2020 Pilkada in Makassar City. Under the guidance of Prof. Muhammad as the Main Advisor and Haryanto as the Assistant Advisor.

This study aims to identify the responses and actions of women in the presence of money politics and identify what factors determine which women accept money politics in the 2020 regional elections in Makassar city.

The type of research used is a type of qualitative research. The data collection was carried out through interviews, determination of informants, observation and documentation. The data obtained is then discussed in a theoretical review of women's political participation

The results of this study indicate that the effect of money politics on women's participation in the 2020 regional elections in Makassar city has indeed had a significant influence where the majority of Makassar city women who accept money politics also participate in the regional elections. the factors that underlie women in carrying out money politics in the 2020 regional elections are due to economic problems, low political education and culture.

Keywords: Women, Money Politics, Participation

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	14
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Patronase	12
2.3 Money Politic / Politik Uang	15
2.3.1 Bentuk-Bentuk Politik Uang (Money Politic).....	16
2.3.2 Undang Undang Yang Berkaitan Dengan Money Politic.....	18
2.4 Teori Partisipasi Politik Perempuan	20
2.5 Kerangka Pemikiran	24
2.6 Skema Pikir	28
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Lokasi Penelitian.....	29
3.2 Jenis dan Tipe	29

3.3	Jenis dan Sumber Data	31
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5	Teknik Analisis Data	34
BAB IV	37
GAMBARAN UMUM PENELITIAN	37
4.1	Sejarah Singkat Kota Makassar	37
4.2	Partisipasi Politik Perempuan di Kota Makassar	44
BAB V	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
5.1	Respons dan Tindakan Perempuan menerima Money Politics pada Pilkada Tahun 2020 di Kota Makassar.....	48
5.1.1	Sikap Ganda Perempuan dalam Memilih Calon.....	50
5.1.2	Menerima dan Melibatkan Keluarga Terdekatnya	53
5.1.3	Tindakan Pasif Perempuan Ketika Melihat Money Politics.....	57
5.2	Penyebab Perempuan ketika Menerima Money Politics....	59
5.2.1	Faktor Ekonomi	60
5.2.2	Faktor Pendidikan Politik yang Rendah	63
5.2.3	Faktor Budaya	65
BAB VI	68
PENUTUP	68
6.1	Kesimpulan.....	68
6.2	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Pembagian Wilayah Dan Luas Setiap Kecamatan	41
Tabel 4.2	Rekapitulasi pemilih tetap pilwali Makassar 2018.....	43
Tabel 4.3	Rekapitulasi pemilih tetap pilwali Makassar 2020.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungan hubungannya dengan negara negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai pasrtisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum ataupun pemilihan kepemimpinan suatu negara, provinsi, daerah mauapun kabupaten.¹

Istilah money politic secara luas digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik, seperti: para kandidat yang membagi bagikan uang kepada pemilih, hal tersebut bermula sejak demokratisasi di Indonesia pada akhir tahun 1990-an sehingga istilah money politic bisa dikatakan hal yang tidak asing lagi di khalayak umum ataupun kalangan masyarakat khususnya di Indonesia². Dan sampai saat ini, orang menggunakan istilah money poltic untuk menggambarkan praktik-praktik yang merujuk pada distribusi uang (uang tunai dan terkadang dalam bentuk barang) dari kandidat kepada pemilih

¹ Prof Miriam Budiarjo, Dasar Dasar Ilmu Politik, 2008, hal 367

² Edward Aspinall, Pilitik Uang Di Indonesia 'Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014' (Yogyakarta: POLGOV, 2015), hal 2.

pada saat masa kampanye. Money politic menjadi salah satu pilihan dalam masa kampanye sebab uang merupakan faktor urgen/penting yang berguna untuk mendongkrak kharisma pesona seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Karena pada dasarnya, politik adalah seni. Dimana seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.³

Kejadian-kejadian berupa pelanggaran dalam pemilu sering terjadi khususnya pada masa kampanye, salah satunya adalah Money Politics, kegiatan Money Politics yang banyak dilakukan oleh para calon kandidat maupun dari tim sukses guna meraup suara dan simpatisan. Kasus Money politics yang penulis temukan pada berbagai sumber ini untuk memperkuat akan bukti dari beberapa kejadian Money Politik pada pemilu diantaranya kasus di makassar dimana seorang calon pilkada terduga melakukan praktik politik uang berupa pembagian beras kepada warga dengan barang bukti berupa video yang sebelumnya sudah tersebar di sejumlah grup aplikasi WhatsApp dan media sosial.⁴ Sedangkan dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) menganggap money politic bukan lagi sekedar penyimpangan. Melainkan Money politic adalah sebuah kejahatan. Herbert McClosky seorang tokoh

³ Heru Nugroho, Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal 95.

⁴ Diakses melalui <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1312811-dugaan-politik-uang-pilkada-makassar-sudah-diproses-polisi>

masalah partisipasi berpendapat bahwa “partisipasi politik adalah kegiatan kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung dan secara tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.⁵”

Dari data data yang telah diberikan oleh instansi Bawaslu Kota Makassar, adapun kasus money politics perempuan yang terjadi pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar pada tahun 2020 berjumlah 8 laporan kasus dari 40 laporan kasus pelanggaran secara keseluruhan yang ada pada saat pilkada 2020 berlangsung. Adapun bentuk bentuk kasus money politik yang dominan terjadi dalam 8 kasus tersebut ialah berupa sembako diberikan kepada ibu rumah tangga “Praktek politik uang itu lebih banyak menysasar ke kebutuhan rumah tangga, yang namanya rumah tangga tentunya perempuan itu paling banyak menjadi penghuni rumah tangga, jilbab, sembako, uang, baju dan lain sebagainya lebih banyak menysasar ke kebutuhan perempuan sekaligus rumah tangga beserta keluarganya berbeda dengan laki laki dalam berumah tangga yang fokus bekerja dan mencari uang sisanya perempuanlah yang mengurus keadaan kebutuhan rumah tangga dalam sebuah keluarga. Jadi saya rasa memang orang orang yang memberikan politik uang ini berfikir bahwa perempuan ini lebih gampang dan dianggap orang yang bisa mempengaruhi suaminya maupun anaknya

⁵ Herbert McClosky, Political Participation,” International Encyclopedia of the social sciences, New York: The Macmillan Company, 1972, hal 252

sehingga besar sekali potensi perempuan mendapatkan kasus tersebut seperti kasus terlapor yang mendapatkan sp 3 kemarin itu perempuan yang menjadi terlapornya ibu rumah tangga, jadi dia yang bagi ke tetangga, dia didropkan sembako lalu dia panggil tetangganya datang ambil. Jadi perempuan itu bisa menjadi pelaku politik uang, bisa menjadi sekedar perantara dan bisa jadi penerima karena dia adalah komponen yang besar apalagi pemilih perempuan ini lebih tinggi dari pada laki laki dan dia bisa mempengaruhi.⁶

Money politic sebenarnya bertentangan dengan UU No 3 Tahun 1999 Pasal 73 ayat 3 yang menjelaskan bahwa siapapun pada waktu diselenggarakan pemilihan umum melakukan pemberian atau janji menyuap, akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun. Pidana dikenakan kepada yang memberi maupun yang diberi.⁷ Akan tetapi kondisi masyarakat Indonesia yang dibawah rata-rata (ekonomi lemah), menjadikan satu alasan yang mendorong sehingga para calon kandidat dalam kampanyenya melakukan strategi politik uang kepada rakyat supaya mereka dapat menarik hati para masyarakat. Namun uniknya walaupun praktik money politic benar dilakukan oleh para calon kandidat, akan tetapi amatlah sukar untuk membuktikannya. Seperti apa yang dikatakan oleh Riyas Rasyid penggagas Otonomi Daerah, bahwa money politics seperti tersamarkan, hanya terdengar suara, namun untuk

⁶ Sri Wahyuningsih, SH, Kord Divisi Penanganan dan Pelanggaran Bawaslu Kota Makassar

⁷ Darmawan, D. (2012, November). Pemilihan umum dan demokrasi. Jakarta Selatan. Diakses pada tanggal 22 April dari suarapublik.co.id/index/index.php?politik-uang). Hal.11.

membuktikan siapa yang melakukan sangatlah sukar. Karena bagaimanapun si penerima uang dari calon yang akan dipilih tidak akan berani untuk buka mulut, disebabkan adanya Undang-Undang yang mengatur, si pemberi dan si penerima sama sama melakukan korupsi dan diancam dengan hukuman penjara.⁸

Representasi perempuan dalam bidang politik dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Di Indonesia sendiri perempuan yang terjun dalam dunia perpolitikan masih terbelenggu dengan latar belakang, budaya patriarki, perbedaan gender. Meskipun sampai saat ini selalu ada upaya untuk memperbaiki persoalan tersebut. Penulis menyakini bahwa ada hal mendasar yang membuat perempuan begitu sulit masuk dalam dunia perpolitikan entahkan itu dalam sistem memilih maupun dipilih yang dimana sistem yang masih terjaga dan masih terawat dalam kehidupan masyarakat. Sebuah anggapan bahwa derajat perempuan adalah dibawah laki-laki. Perempuan adalah mahluk lemah dan harus dilindungi sehingga harus di perlakukan sesuai dengan kemauan laki-laki. Khawatirnya ialah malah berujung pada kasus kekerasan terhadap perempuan.

Padahal Negara Indonesia adalah Negara demokrasi dan pancasila. Setiap individu dalam masyarakat memiliki kebebasan tersendiri. Kebebasan

⁸ Luqman Hakim, 2014, Pakar nilai UU Pemilu belum tegas tindak politik uang dalam <http://www.antarane.ws.com/berita/426408/pakar-nilai-uu-pemilu-belum-tegas-tindak-politikuang> diunduh 22 April

mengekspresikan dirinya melakukan segala tindakan sosial dengan tetap terikat pada hukum yang berlaku. Memilih maupun mencalonkan untuk dipilih dalam masyarakat. Itu semua bagian dari demokrasi. Begitu juga dalam sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan bawasannya tidak dibenarkan adanya pengkulturan dalam masyarakat Indonesia. Tidak boleh ada diskriminasi, pengkotakan atau pengkelasan dalam masyarakat apalagi berdasarkan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Semuanya dianggap sebagai entitas yang sama dan sejatinya diperlakukan adil. keadilan dalam ruang politik, ekonomi, sosial masyarakat.

Adapun literatur review tentang topik money politik dengan perempuan sebelumnya sudah ada jurnal yang membahas tentang topik tersebut dengan judul sikap dan pemaknaan perempuan marginal terhadap politik uang yang dimana studi kasusnya pada pemilu tahun 2014 dikabupaten kudus.⁹ Pada jurnal tersebut menjelaskan bahwa Pemilih perempuan dipilih karena selama ini suaranya jarang didengar padahal di lapangan justru kelompok inilah yang berkontribusi lebih besar pada perolehan suara seorang caleg maupun calon presiden dan wakil presiden. Dalam jurnal tersebut memandang bahwa sikap dan pemaknaan perempuan terhadap politik uang dapat dibedakan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, bersikap

⁹ <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/613/626>

menolak politik uang. Kelompok kedua, menerima politik uang dan menjadikan uang sebagai faktor penentu pilihan politiknya. Dan Kelompok ketiga, menerima politik uang tetapi tidak mempengaruhi pilihan politiknya. Namun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan jurnal tersebut ialah dimana jurnal tersebut mempertanyakan perempuan marginal yang ada di daerah kudu yang dimana dalam menerjemahkan bahasa mereka saja sudah menjadi kesulitan yang luar biasa, apalagi sampai bisa mengungkapkan pandangan-pandangan politik mereka.

Dalam penelitian ini kasus yang saya teliti ialah bagaimana respond kaum perempuan dalam menerima adanya kasus praktik money politik di lingkungannya sebab secara umum pada dasarnya laki laki lebih mendominasi praktik politik uang dimakassar pada beberapa dekade terakhir. Alasan penulis memilih kasus tersebut ialah agar dapat menjadi referensi bagi para pembaca untuk melihat faktor faktor yang melatar belakangi perempuan dalam menerima praktik politik entahkah itu berupa faktor ekonomi yang melanda, faktor lemahnya regulasi tentang politik uang terhadap kaum perempuan pada pemilu ataupun pilkada atau bahkan faktor budaya yang dimana kebiasaan yang sudah membudaya di indonesia, yakni tidak pantas jika menolak pemberian dan terbiasa membalas pemberian sehingga kaum perempuan melakukan money politics sehingga memang bisa dikatakan politik uang sudah melekat dengan masyarakat seolah sudah menjadi rutinitas lima tahunan tiap diadakannya Pemilihan.

Dalam literatur review yang ada sebelumnya menjelaskan sikap dan pemaknaan perempuan terhadap politik uang yang dimana dalam kaitanya melihat tolak ukur perempuan menerima money politik serta pemaknaan dalam ririnya mengenai subjek politik uang itu sendiri begitu pula dalam penelitian terdahulu yang dimana hanya membahas pengaruh money poltics terhadap masyarakat secara umum yang berbeda dengan penelitian penulis yang lebih mendetail mengenai respond dari kaum perempuan serta faktor faktornya. Dari literatur review yang ada bisa dikatakan bahwa masih kurangnya kasus yang mengangkat respond, faktor dan atau penyebab perempuan menerima money politics di lingkunganya dengan melihat faktor faktor yang melatar belakanginya baik itu dalam bentuk faktor ekonomi, pendidikan, dan status sosial mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah tersusun, penulis ingin membahas rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana respond dan tindakan kaum perempuan dengan adanya money politics pada pilkada tahun 2020 di kota makassar?
2. Apa alasan kaum perempuan ketika menerima money politics?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi respond dan tindakan kaum perempuan dengan terdapatnya money politik dan mengidentifikasi

faktor apa saja yang menjadi penentu kaum perempuan sehingga menerima money politics pada pilkada tahun 2020 di kota makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan Khususnya terhadap ilmu politik yang mengkaji tentang money politic.
- b. Menambah wawasan pengetahuan politik serta dijadikan bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut terkait money politics kaum perempuan, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat : Penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran bagi kaum perempuan untuk mengetahui arti dasar dari demokrasi itu sendiri agar tercipta pemilu yang sehat dan bebas dari kecurangan money politic.
- b. Bagi Aktor Politik : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para aktor politik tentang pentingnya sportifitas dalam meraup suara dalam pemilu agar nilai-nilai demokrasi tidak tercoreng dan agar pelaku poltik menyadari akan dampak dari tidakan Money politic.
- c. Bagi Peneliti : Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka merupakan bagian yang penting untuk memperjelas sebuah penelitian dari tinjauan teoritisnya. Literatur-literatur yang merupakan pendapat para ahli dan beberapa website yang ditambahkan untuk melengkapi penulisan ini. Bab ini akan membahas tentang beberapa konsep, pendekatan, dan teori yang dapat mendukung jalannya penelitian. Peneliti akan menjadikan konsep, pendekatan, dan teori tersebut sebagai alat analisis pada penelitian ini. Pada bab ini juga akan di bahas mengenai kerangka pikir serta skema pikir penelitian, aspek-aspek tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa penelitian di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang dilakukan oleh Andi Akbar dengan judul "Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba". Dalam skripsi ini di jelaskan mengenai bagaimana pengaruh Money Politics terhadap partisipasi masyarakat di desa Barugae pada pilkada tahun 2015 dan Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi sehingga masyarakat desa Barugae melakukan money politics. Terdapat kesamaan antara skripsi ini dengan penelitian saya karena dalam penelitian ini kami

sama-sama membahas mengenai bagaimana respond dan perilaku politik yang diberikan setelah mendapatkan tindakan money politics. Yang menjadi pembedanya ialah pada skripsi ini membahas mengenai pengaruh money politik terhadap seluruh masyarakat di kabupaten bulukumba, sedangkan saya membahas mengenai pengaruh dan hal apa yang memotivasi kaum perempuan menerima money politics yang hanya dikhususkan oleh kaum perempuan saja di kota makassar.

Skripsi selanjutnya yang berjudul "Pengaruh Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada Pada Tahun 2018 Di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, Oleh Dian Amaliah. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana pengaruh dan dampak money politik terhadap keberlangsungan demokrasi yang melatar belakangi pengaruh Money Politics terhadap partisipasi masyarakat di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang, hanya saja skripsi ini hanya membahas mengenai pengaruh dan dampak money politics bukan bagaimana perilaku dan respond masyarakat dengan adanya tindakan money politics tersebut.

Yang terakhir ialah skripsi yang berjudul pengaruh money politics terhadap partisipasi masyarakat kota makassar pada pemilihan umum anggota legislative 2019, oleh Dery Alex Putra. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana faktor-faktor terjadinya money politic pada pemilihan umum anggota legislatif 2019 dikota makassar. Skripsi hampir sama dengan skripsi

yang ada di atas, dalam skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana pengaruh money politic terhadap partisipasi masyarakat kecamatan Tallo kota Makassar pada pemilihan calon anggota legislatif 2019 dan Faktor – faktor apa saja yang melatar belakangi sehingga masyarakat melakukan/menerima money politic sedangkan pada penelitian saya lebih terfokus pada sisi kaum perempuan bukan dari masyarakat secara keseluruhan.

2.2 Patronase

Secara istilah patron berasal dari bahasa Latin “patrönus” atau “pater” yang berarti ayah dalam bahasa Indonesia. Kata ini merujuk pada peran seorang ayah sebagai pemimpin yang memiliki ikatan secara personal dengan anggota keluarganya dan memberikan perlindungan dalam segala aspek bagi keluarganya. Begitupula kata klien juga berasal dari istilah Latin “cliëns” yang berarti pengikut.

Konsep patronase didefinisikan sebagai relasi dua arah ketika seorang yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan pada orang lain yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah (klien) yang memberikan dukungan dan bantuan kepada patron.

Patronase sebagai sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari

mereka, yang telah berupaya untuk membedakan kedua konsep tersebut).¹⁰ Dengan demikian, patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang di distribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditunjukkan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/komunitas (lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung).

Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (pembelian suara) atau dari dana publik (proyek-proyek pork barrel yang dibiayai oleh pemerintah). Meskipun demikian, penulis membedakan Patronase dengan materi-materi yang bersifat programati (programatik goods), yaitu materi yang diterima oleh seseorang yang menjadi target dari program-program pemerintah, misalnya, program kartu pelayanan kesehatan yang menawarkan perawatan gratis untuk penduduk miskin.

Patronase politik terjadi ketika para pemilih, para penggiat kampanye atau actor actor lain menyediakan dukungan electoral bagi politisi dengan imbalan berupa bantuan atau manfaat material.¹¹ Para politisi tersebut menggunakan metode patronase untuk memenangkan pemilihan dengan membagi baagikan bantuan, barang barang, atau uang tunai kepada para

¹⁰ Edward Aspinall & Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia*, hlm 4

¹¹ Edward Aspinall & Ward Berenschot, *Democracy For Sale*, hal 2.

pemilih baik individual maupun kelompok kelompok kecil. Dengan itu mereka diharapkan bisa membalasnya dengan memberikan suara mereka bagi para politisi tersebut. Barang barang dan bantuan tersebut bisa berwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari amplop yang berisikan uang tunai hingga bantuan untuk meloloskan seorang anak pemilih kedalam program beasiswa pemerintah, dari sebuah pekerjaan sebagai pesuruh di rumah sakit hingga berupa sebuah kontrak proyek pembangunan dari pemerintah.

Esensi dari politik patronase adalah *quid pro quo*, sesuatu untuk sesuatu, atau sebagaimana sering digambarkan dalam Pustaka keilmuan, “pertukaran yang kontingen” politisi menawarkan keuntungan dengan harapan bahwa para penerima akan membalasnya dengan dukungan politik, atau sebagai balasan atas dukungan politik yang telah diberikan para pemilih sebelumnya.

Unsur resiprositas ini membedakan patronase atau klientelisme dari politik programatik, dimana para calon atau partai partai menawarkan kebijakan kebijakan yang luas yang memberikan manfaat bagi banyak orang bahkan bagi seluruh populasi tanpa memperhatikan dukungan politik yang mereka berikan pada saat pemilihan umum berlangsung. Jadi Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung.

2.3 Money Politic / Politik Uang

Money Politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok, Money Politic atau politik uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan Money Politic sebagai tindakan jual beli pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu biasa terjadi dalam jangkauan yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu Negara.¹²

Money politic adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Money politic umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak, gula dan sarung kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum, banyak terjadinya praktik Money Politic atau Politik Uang yang ikut mewarnai acara pesta dan peta demokrasi yang berlangsung di negara ini.

Money Politic banyak membawa pengaruh akan peta perpolitikan Nasional serta juga dalam proses yang terjadi dalam pesta politik. Dalam norma standar demokrasi, dukungan politik yang diberikan oleh satu aktor

¹² Indra Ismawan, Pengaruh Uang dalam Pemilu, Yogyakarta: Media Persindo, 1999, hal 5.

terhadap aktor politik lainnya didasarkan pada persamaan preferensi politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan publik. Dan juga setiap warga negara mempunyai hak dan nilai suara yang sama (satu orang, satu suara, satu nilai). Namun, melalui Money Politic dukungan politik diberikan atas pertimbangan uang dan sumber daya ekonomi lainnya yang dilakukan oleh aktor politik tertentu.

2.3.1 Bentuk-Bentuk Politik Uang (Money Politic)

Berikut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk Money Politic, sebagai berikut:

a. Berbentuk Uang (Cash Money)

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.¹³

Dalam pemilihan, uang sangat berperan penting, Modus Money Politic yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

¹³ Heru Nugroho, Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001 hal 95.

- Sarana Kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.
- Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan Money Politic misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu. Bantuan Langsung (Sembako Politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya, Contoh nyata dari Sembako Politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie, minyak, gula atau pun bahan-bahan sembako lainnya. Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah.

b. Berbentuk fasilitas umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat didaerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “jariyah politisi” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen,

pasir, besi, batudan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.¹⁴

2.3.2 Undang Undang Yang Berkaitan Dengan Money Politic

Berikut sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang seperti yang diatur dalam UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung atau pun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

¹⁴ Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Semarang: Rasail, 2006, hal 24.

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

- KUHP, BAB V Penyertaan dalam Tindak Pidana Pasal 55

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

- Pasal 149

(1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturanaturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

2.4 Teori Partisipasi Politik Perempuan

Digunakannya teori partisipasi politik perempuan dalam proposal penelitian ini adalah karena, tingkat partisipasi politik perempuan adalah salah satu faktor yang menentukan apakah pemilu ataupun pilkada yang berlangsung berhasil atau tidak, semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih perempuan maka tingkat keberhasilan pemilu atau pilkada juga semakin tinggi. Sebelum menjelaskan partisipasi politik perempuan maka sudah seharusnya kita harus memahami konsep tersendiri dari partisipasi itu.

Kata partisipasi merupakan “hal tentang turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau berperan serta. Peran politik terkait erat dengan aktivitas-aktivitas politik; mulai dari peranan para politikus profesional, pemberian suara, aktivitas partai sampai demonstrasi. Dalam pengertian umum, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Kegiatan ini dapat berupa pemberian suara dalam Pemilu, menjadi anggota suatu partai dan lain sebagainya. Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam setiap pertanggung jawaban bersama. Partisipasi secara harfiah dimaknai sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya *The*

Social Contract mengatakan, partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara¹⁵.

Jadi tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Bila suatu negara membatasi akses dan keterlibatan warganya dalam setiap pengambilan keputusan, maka demokrasinya belum dapat dikatakan berkembang secara baik. Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran elementer, untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara. Demokrasi sebagai suatu sistem politik berupaya untuk memberikan wadah seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan yang otoriter, fasis dan anti demokrasi biasanya menenggelamkan adanya partisipasi politik warga. Urusan kekuasaan disederhanakan hanya sebatas milik para elite politik.

Partisipasi politik perempuan dapat kita artikan sebagai keterlibatan perempuan di dalam kegiatan-kegiatan politik. Saat ini, partisipasi politik perempuan masih tergolong rendah apabila dilihat dari bentuk partisipasi politiknya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Pembatasan perempuan untuk mengakses bidang-bidang maskulin seperti politik tidak hanya terjadi di kawasan Barat namun juga terinternalisasi dalam masyarakat Indonesia. Sejarah Indonesia

¹⁵ Jean-Jacques Rousseau.1996. The Social Contract. Hal 419.

mencatat bahwa tokoh pahlawan perlawanan Belanda sebagian besar adalah pria. Hal tersebut berkaitan pada asumsi dasar masyarakat tentang perempuan bahwa secara alami perempuan sudah kodratnya untuk dilindungi sehingga hanya diberi tanggung jawab domestik. Sejak era kerajaan sampai pada perlawanan Indonesia terhadap kolonial, peran perempuan sangat marginal. Marginalitas itu diperparah ketika komunitas wanita dilarang untuk menikmati fasilitas pendidikan. Hal ini sesuai dengan surat yang ditulis oleh Raden Adjeng Kartini yang berisikan tentang gagasan dan ambisi untuk wanita diberi kebebasan mendapatkan pendidikan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut berlanjut dan masih menjadi halangan sampai sekarang.

Melihat tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah, mengikuti pembagian Paige, partisipasi politik perempuan bisa dibagi ke dalam empat tipe, yaitu¹⁶:

1. Aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik, dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi.
2. Apatis (pasif-tertekan), yaitu apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah.
3. Militan radikal, yaitu apabila kesadaran politik tinggi, kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah;

¹⁶ Dalam buku Zaenal Mukaram tahun 2015 hal 267

4. Pasif, yaitu apabila kesadaran politik rendah, dan kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi. Dalam menjalankan partisipasinya perempuan mendapatkan banyak kendala.

Lycette merupakan peneliti yang tinggal di Inggris yang melakukan penelitian di USA dengan judul penelitiannya “Adjusting Project to Overcome Constraint on Women Participation Forum” di USA pada tahun 1994. Menurutnya terdapat paling sedikit empat kendala bagi perempuan dalam berpartisipasi di bidang politik, yaitu disebabkan karena¹⁷:

1. Perempuan menjalankan dua peran sekaligus, yaitu peran reproduktif dan peran produktif, di dalam maupun di luar rumah;
2. Perempuan relatif memiliki pendidikan yang rendah dibanding dengan laki-laki karena perbedaan kesempatan yang diperoleh;
3. Adanya hambatan budaya yang terkait dengan pembagian kerja secara seksual dan pola interaksi perempuan dengan laki-laki yang membatasi gerak perempuan;
4. Adanya hambatan legal bagi perempuan, seperti larangan kepemilikan tanah, larangan berpartisipasi dalam pendidikan atau program Keluarga Berencana tanpa persetujuan dari suami atau ayahnya.

¹⁷ Dalam dalam buku Zaenal Mukaram tahun 2015 hal 269

Di Negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik dalam alam pikiran ini, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa rezim yang sedang berkuasa memiliki keabsahan yang tinggi. Dan sebaliknya rendahnya partisipasi politik di suatu Negara dianggap kurang baik karena menunjukkan rendahnya perhatian warga terhadap masalah politik, selain itu rendahnya partisipasi politik juga menunjukkan lemahnya legitimasi dari rezim yang sedang berkuasa.

2.5 Kerangka Pemikiran

Masyarakat kota makassar telah selesai menyelenggarakan pesta demokrasi yaitu Pemilihan Umum Wali Kota Makassar yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020 merupakan pemilihan para kepala daerah dan wali kota yang diselenggarakan serentak se-Indonesia. Pemilihan para wakil rakyat yang akan duduk di Lembaga pemerintahan ini merupakan perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Namun pelaksanaan pilkada di Indonesia sering diciderai oleh praktik praktik money politic. Dalam praktek money politic terdapat dua subjek yang menyebabkan terlaksananya praktek money politic, yaitu peserta pemilu (calon pilkada) dan masyarakat sebagai pemilih.

Money politic memberikan efek negatif bagi para elit dengan menghambur-hamburkan uang dalam waktu sekejap demi meraih kekuasaan

semata, begitupun sebaliknya sangat menggiurkan juga bagi masyarakat meskipun sesaat, karena itu juga masyarakat merasa berhutang budi pada calon yang memberikan uang tersebut. Biasanya peserta pemilu yang tidak memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat akan membuat program-program yang di dalamnya terindikasi money politic. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal apa saja yang telah terjadi di tengah-tengah masyarakat kota Makassar khususnya kaum perempuan, sehingga cukup banyak yang mengaku mendapat tawaran uang atau barang 17 %, atau mengetahui bahwa warga di lingkungan mereka mendapat tawaran tersebut 20 %. Dari yang mendapat tawaran, cukup banyak yang terpengaruh uang atau pemberian yang ditawarkan tersebut 36 %, meskipun tidak mayoritas dapat membuat partisipasi pemilihan kepala daerah yang bisa dikatakan cukup tinggi pada pilkada tahun 2020 di kota Makassar yang dimana hal ini tidak lepas dari perilaku masyarakat sehingga membuat partisipasi pemilihan tergolong tinggi.

Partisipasi politik perempuan dapat kita artikan sebagai keterlibatan perempuan di dalam kegiatan-kegiatan politik. Saat ini, partisipasi politik perempuan masih tergolong rendah apabila dilihat dari bentuk partisipasi politiknya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Pembatasan perempuan untuk mengakses bidang-bidang maskulin seperti politik tidak hanya terjadi di kawasan Barat namun juga terinternalisasi dalam masyarakat Indonesia.

Adapun data data yang diperoleh dari Bawaslu Kota Makassar mengenai laporan kasus pelanggaran money politics perempuan berjumlah 8 dari 40 laporan kasus pelanggaran secara keseluruhan yang ada pada saat pilkada 2020 berlangsung. Data data tersebut antara lain sebagai berikut :

- Laporan terkait dugaan pelanggaran tindak pidana dengan menjanjikan memberikan materi beras kepada ibu ibu rumah tangga yang dilakukan oleh tim pemenangan danny fatma atas perintah dari calon walikota dan wakil walikota makassar tahun 2020 paslon nomor urut 1 yang dimana dari hasil tindak lanjut tersebut dari instansi bawaslu melihat pelanggaran dan memberikan SP 3 kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota no urut 1 tersebut.
- Laporan dugaan pelanggaran kampanye dengan memberikan uang atau materi lainnya kepada ibu rumah tangga dan anak muda di jalan cendrawasih Lorong 31 kelurahan kunjung mae, kecamatan mariso, kota makassar di sekitar kediaman yusuf kalla dengan pemberian beras yang diduga dilakukan oleh tim pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 2 munafri arifuddin dan Rahman bando.
- Laporan di duga ketua RT 003 kelurahan timungan lompoa membagikan surat bantuan sosial kepada ibu rumah tangga di setiap rumah dengan menyelipkan kartu dukungan pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar nomor urut 2 dan memberi tahu kepada warga yang

menerima bansos dengan kata “pilihko ini kalau mau dapat bantuan sosial lagi” laporan dilaporkan pada tanggal 28 november 2020.

- Pada tanggal tanggal 10 desember 2020 pelapor melapor di bawaslu kota makassar terhadap adanya dugaan politik uang yang diduga dilakukan oleh tim hukum paslon 2 atas nama yusuf gunco membagikan sejumlah uang senilai 50.000/ kepada ibu ibu dan bapak bapak dengan intruksi memilih pasangan calon no urut 2.
- Laporan terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota makassar tahun 2020 no urut 2, bahwa diduga adanya perbuatan menjanjikan dan atau memberikan berupa beras pada tahapan kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun 2020.
- Laporan pada tanggal 8 desember 2020 pukul 14.00 telah diduga terjadi adanya bagi bagi uang yang dilakukan oleh LO paslon no urut 4 haris alias (opa) dan dibagikan kepada seorang ibu rumah tangga (ernawati) dan anak muda (wahyudi).
- Laporan terkait adanya dugaan pelanggaran kampanye duta Kesehatan appi Rahman dating keposko ballalompona militant dp fatma kecamatan wajo dijalan Tarakang no 99 kelurahan malimongantuan 2 orang tersebut memberikan masker di dalam posko dengan berfoto dan video dengan tagline appi Rahman bangkit coblos no 2.

- Laporan yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran anggota KPPS 16,17 dan 06 kelurahan bontoduri diduga ikut berjalan kaki keliling wilayah bonto duri membagi bagikan masker salah satu paslon dan memakai atribut pasangan calon nomor urut 1 pada tanggal 24 november 2020.

2.6 Skema Pikir

